



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng, Simboro, Mamuju,  
Sulawesi Barat WA Live Chat. 0823-9888-8900  
website <https://sulbar.bpk.go.id>,  
Sosial Media X, Instagram, Youtube, TikTok: @bpkrisulbar

## **SIARAN PERS**

### **PENYERAHAN LHP KINERJA ATAS PENANGGULANGAN BENCANA PADA PROV. SULBAR, ATAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARANN JKN PADA PEMKAB MAMUJU, DAN PENGELOLAAN APBD PADA PEMKAB MAJENE**

*Mamuju – Humas dan TU Perwakilan*

**Kamis (09/01)** – sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2024 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan Pemeriksaan Kinerja atas 1) upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di tahap prabencana TA 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Prov. Sulbar; 2) pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) TA 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kab. Mamuju; 3) pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mendukung pembangunan nasional TA 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kab. Majene.

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai apakah upaya yang telah dilakukan masing-masing pemerintah daerah telah memadai dalam penyelenggaraan 1) penanggulangan bencana di tahap prabencana TA 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Prov. Sulbar; 2) pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) TA 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kab. Mamuju; dan 3) pengelolaan APBD dalam rangka mendukung pembangunan nasional TA 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kab. Majene.

Atas pemeriksaan tersebut, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat **I Putu Wisudhantara**, didampingi Kepala Subauditorat, **Rizki Satriyo Nugroho**, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja kepada masing-masing kepada Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten atau yang mewakili dan Pj. Bupati/Bupati atau yang mewakili.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Namun demikian, hasil pemeriksaan masih menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraan program pemerintah. Dengan mempertimbangkan upaya, capaian keberhasilan dan kelemahan-kelemahan sebagaimana diuraikan dalam LHP BPK, BPK menyimpulkan apabila kelemahan-kelemahan tersebut tidak diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas upaya penyelenggaraan program pada masing-masing pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Kepala Perwakilan berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi pendorong dan motivasi dalam melaksanakan perbaikan pengelolaan keuangan ditahun berikutnya dan berharap agar DPRD dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaan ini, terutama dalam mengingatkan agar pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti Rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.